



newsletter

Tanhana Dharma Mangrva • edisi 117, April 2019



Walikota Risma Berbagi Ilmu di PPRA 59 (hal. 7)

Lemhannas RI Tandatangani Memorandum Saling Pengertian dengan Kementerian Agama RI dan Universitas Semarang.....	2
Wakil Gubernur Lemhannas RI Pimpin Upacara Bendera di Lemhannas RI.....	3
Jelang Pemilu, Lemhannas Diskusi dengan Pemred Media Massa.....	4
Gubernur Lemhannas RI Lantik dan Rotasi Sejumlah Pejabat.....	5
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Kunjungi Lemhannas RI.....	6

Walikota Risma Berbagi Ilmu di PPRA 59 Lemhannas RI.....	7
Gubernur Lemhannas RI Membuka PPSA 22 Lemhannas RI.....	8
Rapat Anggota Tahunan Koperasi Primer Lemhannas RI.....	9
Maktab Pertahanan Angkatan Tentera (MPAT) Malaysia Kunjungi Lemhannas RI.....	9
Agus Widjojo Berikan Materi Kepemimpinan Kepada Para Peserta PPRA 59 Lemhannas RI.....	10
Pembekalan Pengenalan Lembaga Bagi CPNS Lemhannas RI....	10
Lemhannas RI dan Kemitraan Diskusi tentang Reformasi TNI....	11

Lemhannas RI Tandatangani Memorandum Saling Pengertian dengan Kementerian Agama RI dan Universitas Semarang

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan sambutannya saat penandatanganan memorandum saling pengertian antara Lemhannas RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Universitas Semarang (USM) bertempat di Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI (15/3).

“Memorandum Saling Pengertian antara Lemhannas RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Universitas Semarang merupakan wujud komitmen bersama untuk menjalin kerja sama,” kata Agus Widjojo.

Memorandum saling pengertian tersebut, mencakup beberapa bidang yaitu, bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pertukaran informasi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional; pertukaran tenaga ahli/pakar/akademisi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan; serta bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

Agus Widjojo juga menyampaikan harapannya bahwa dengan telah ditandatanganinya memorandum saling pengertian tersebut, diharapkan adanya implementasi dalam kegiatan nyata secara konsisten terkait dengan bidang-bidang yang ada di dalam ruang lingkup yang dikerjasamakan.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap penandatanganan memorandum saling pengertian ini, ketiga institusi dapat saling bertukar narasumber

dalam upaya menambah wawasan dan pengetahuan yang luas dan lebih mendalam terkait dengan hal-hal yang menyangkut wawasan kebangsaan dan kecintaan kepada tanah air. Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa para penggiat agama perlu untuk dibekali dengan wawasan kebangsaan yang kuat.

Rektor Universitas Semarang Andi Kridasusila juga menyampaikan bahwa ketiga institusi, Lemhannas RI, Kementerian Agama, serta Universitas Semarang, memiliki elemen-elemen yang bisa menyampaikan hal-hal baik di masyarakat.

Dalam waktu dekat, kerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia akan dilaksanakan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan peserta kurang lebih 100 orang, oleh Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.

Sedangkan bersama Universitas Semarang akan dilaksanakan pelatihan yang sama untuk para pengajar/dosen dan staf serta mahasiswa, di mana dalam pelaksanaannya akan digabungkan dengan institusi lain guna memenuhi kuota kelas yang tersedia.

Memorandum Saling Pengertian antara Lemhannas RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Universitas Semarang, merupakan wujud komitmen bersama untuk menjalin kerja sama

*Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo*





Wakil Gubernur Lemhannas RI Pimpin Upacara Bendera di Lemhannas RI

Lemhannas RI menyelenggarakan Upacara Bendera, Senin (18/3) di Lapangan Tengah Lemhannas RI. Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Wiko Syofyan mewakili Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang berhalangan hadir sebagai Inspektur Upacara.

Dalam amanat Gubernur yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, seluruh anggota Lemhannas RI dihimbau untuk mampu mencermati dinamika politik terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota legislatif yang akan dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, jelas Agus Widjojo dalam pidatonya yang dibacakan wakil Gubernur Lemhannas RI, menghimbau seluruh anggota Lemhannas RI agar dapat bersikap netral sebagai abdi negara yang bertindak sebagai peredam potensi-pontesi konflik dan perpecahan sekaligus mengantisipasi berbagai akses negatif yang akan muncul di tengah masyarakat.

Menjelang akhir triwulan pertama, Wiko Syofyan yang menyampaikan amanat Gubernur menyampaikan bahwa besaran daya serap Lemhannas RI telah melampaui target yang ditetapkan dari total anggaran Lemhannas RI. Maka dari itu, Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unit kerja dan berharap agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan.

Untuk para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), terkait dengan tugas dan fungsi Lemhannas RI dalam bidang

pendidikan saat ini, program PPRA 59 telah memasuki kegiatan *on campus*, setelah sebelumnya melaksanakan tugas *off campus* dan *outbond*. Oleh karena itu, seluruh peserta diharapkan untuk fokus dengan seluruh materi yang diberikan dan menjaga kedisiplinan, etika, dan kesehatan dalam menempuh pendidikan hingga selesai.

Terkait dengan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 22 yang dibuka pada tanggal 26 Maret 2019 dan berlangsung selama lima setengah bulan, Agus Widjojo dalam sambutannya menyampaikan agar Kedeputan Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional mempersiapkan 10 komponen pendidikan guna mendukung kegiatan PPSA 22.

Selain itu, terkait dengan pengkajian strategik, Lemhannas RI telah memulai rangkaian kajian strategik yang diawali dengan pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*), hingga nantinya menghasilkan kualitas kajian yang baik sebagai rekomendasi kebijakan untuk mendukung program dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menghimbau seluruh anggota Lemhannas RI agar tetap mendukung seluruh kegiatan pemeriksaan BPK RI dan diharapkan Lemhannas RI tetap dapat mempertahankan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Upacara bendera yang diselenggarakan setiap bulan tersebut diikuti oleh para Deputy, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Professional, dan Pejabat Struktural Lemhannas RI, peserta PPRA 59, dan seluruh anggota Lemhannas RI.



Jelang Pemilu, Lemhannas RI Diskusi dengan Pemred Media Massa

Menyikapi situasi menjelang Pemilu 2019 yang semakin memanas, Lemhannas RI menggelar kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, Rabu (20/3), di Ruang Konstitusi Gedung Trigatra, Lantai III, Lemhannas RI.

Forum ini merupakan program rutin Lemhannas RI untuk menyamakan persepsi dengan awak media sebagai penyedia informasi mainstream di masyarakat yang mempunyai peran dalam proses demokratisasi, sekaligus menjadi ajang silaturahmi pimpinan Lemhannas RI dengan pemimpin redaksi (pemred) media massa.

Bertajuk “Mengkritisi Perkembangan Situasi Jelang Pemilu 2019”, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan Lemhannas RI sedang mengkaji sebuah perkiraan tingkat kerawanan menjelang Pemilu 2019, terutama pemilihan presiden, dari perspektif ketahanan nasional.

“Lemhannas menggunakan tiga pendekatan analisis yaitu perbandingan kondisi final pemilihan presiden 2014, pengukuran ketahanan nasional 2018 yang sifatnya relatif final meskipun masih dalam pemantauan, dan kondisi realita yang sifatnya dinamis dengan penyesuaian dan pemutakhiran situasi”, jelas Agus.

Dilihat dari ketiga pendekatan tersebut, ketahanan nasional masa pemilihan presiden cukup kondusif yang dianggap agak mirip dengan kondisi tahun 2014 lalu, meskipun ada beberapa wilayah yang berada pada kondisi kurang kondusif seperti di Aceh, Maluku Utara, Jawa Barat, NTT, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan kekhawatirannya tentang

pergeseran arti relawan dan peran masyarakat sipil sebagai kelompok kekuatan tengah. “Wilayah independen *civil society* akan diambil pelaku politik. Ini yang akan menimbulkan polarisasi di masyarakat. Relawan itu partisan atau non partisan. Relawan kadang lebih galak dari anggota parpol”, ungkap Agus Widjojo. Menurutnya diperlukan pembangunan kekuatan kelompok tengah untuk mencegah perpecahan.

Dalam acara yang dimoderatori oleh Haryanto Saputra, beberapa pemred yang hadir mengungkapkan peran media yang independen dan kredibel dalam memberitakan situasi saat ini. Seperti Pemred Harian Kompas, Ninuk Pambudy yang menyatakan meskipun di bawah redaksi, divisi Litbang Kompas tetaplah independen. “Meskipun anggarannya dari redaksi, Litbang Kompas menyusun metodologi dan memilih tenaga surveyor-nya sendiri”, kata Ninuk.

Sementara itu, Aryo Ardi dari INews TV menyatakan meskipun stasiunnya dimiliki oleh seseorang yang berpolitik, mereka berkomitmen untuk memberitakan informasi terkait Pemilu secara independen. “Secara media, kita berimbang. Kita tidak mengambil porsi tayang yang lebih untuk salah satu partai yang dipimpin oleh pemilik stasiun ini”, ungkapnya.

Nezar Patria, dari Jakarta Post pun menambahkan, unsur berimbang bagi media massa profesional manapun adalah sebuah kewajiban. “Memang media tidak dapat bersikap netral karena kita tidak hidup di ruang hampa, tetapi keberimbangan wajib untuk mencari keakuratan sebuah berita”, pungkasnya.

Selain itu perwakilan dari TV One, IDN Times, RRI, dan MNC TV mengungkapkan perlunya merangkul generasi milenial yang mempunyai karakter berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, terutama dalam memandang masalah kebangsaan dan keindonesiaan.

Gubernur Lemhannas RI Lantik dan Rotasi Sejumlah Pejabat

Lemhannas RI melakukan pelantikan dan pengangkatan sumpah janji bagi sejumlah eselonnya, Kamis (21/3), di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra. Pelantikan dan rotasi yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya perbaikan kinerja organisasi untuk memaksimalkan kinerja lembaga. Proses pemilihan sejumlah pejabat eselon ini melalui proses mekanisme dan pertimbangan berdasarkan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyatakan, pelantikan dan pengangkatan pejabat dalam suatu organisasi bukan sekedar kepercayaan dan kehormatan semata, tetapi juga amanah, tantangan, serta ujian.

“Saya berpesan agar melaksanakan amanah ini secara sungguh-sungguh, ikhlas, dan memberikan yang terbaik bagi Lemhannas RI. Harus ada semangat untuk mengidentifikasi kekurangan dan berusaha meningkatkan kinerja di bidang tugas masing-masing”, pesan Agus Widjojo.

Agus Widjojo melanjutkan, “Setiap tugas yang diemban hendaknya dihayati, apa peran tanggung jawab dan tugas yang harus

dilaksanakan pada jabatan masing-masing. Sepenuhnya berupaya untuk memenuhi kompetensi jabatan.”

Pelaksanaan kegiatan pelantikan dan pengangkatan sumpah janji ini berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI No. 38, 39, 41 dan 44 Tahun 2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Sejumlah eselon yang dilepas diantaranya perwira tinggi bintang 2 dalam rangka pensiun dan perwira tinggi bintang 1 yang menempati jabatan di kesatuannya yang semuanya berjumlah 4 orang. Sementara itu, sejumlah 39 orang pejabat yang dilantik menjadi eselon 2, 3, dan 4, serta dirotasi menjadi tenaga ahli pengajar dan tenaga ahli pengkaji.

“*Setiap tugas yang diemban hendaknya dihayati, apa peran tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan pada jabatan masing-masing. Sepenuhnya berupaya untuk memenuhi kompetensi jabatan*

*Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo*



Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Kunjungi Lemhannas RI



Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto berjumlah 23 melakukan kunjungan ke Lemhannas RI dalam rangka melaksanakan kuliah kerja lapangan, Selasa (26/3). Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Bagian Protokoler dan Peliputan Rohumas Settama Lemhannas RI Kolonel (P) Eddy Tarjono dan dilanjutkan dengan Pembekalan materi oleh Tenaga Profesional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Drs. Edijan Tanjung, M.Si. di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra, Lantai III, Lemhannas RI.

Dalam sambutannya, Eddy Tarjono mengatakan bahwa dalam kunjungan ini, para mahasiswa diharapkan dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat mengenai kebangsaan yang akan disampaikan nanti. "Perhatikan paparan yang akan diberikan pada hari ini sehingga dapat dijadikan sebagai bekal setelah pulang dari Lemhannas," ujar Eddy Tarjono.

Sementara itu, Efy Miftah, S.Pd, M.Pd, menyampaikan terima kasihnya atas sambutan yang diberikan kepada para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk melakukan kunjungan Kuliah Kerja Lapangan ke Lemhannas RI. Efy Miftah mengatakan bahwa kunjungan ke Lemhannas RI telah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto telah dilakukan sejak 2015 lalu.

Kegiatan ini, jelas Efy Miftah, diharapkan dapat memberikan

bekal pengetahuan dan pencerahan bagi para mahasiswa dan juga memberikan informasi kekinian untuk menjadi bekal para mahasiswa saat nantinya menjadi pengajar.

Edijan Tanjung di awal paparannya mengatakan bahwa Pancasila merupakan identitas dasar negara yang berisikan prinsip-prinsip moral kebangsaan. Pancasila juga merupakan penuntun hidup bangsa Indonesia. Edijan juga menambahkan bahwa Pancasila merupakan alat perekat persatuan bangsa Indonesia dan menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia.

Edijan juga menyampaikan bahwa esensi dari Pancasila menyatakan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius namun bukanlah bangsa yang menganut agama tertentu. "Negara tidak menyediakan tempat untuk orang yang tidak beragama," jelas Edijan.

Selain itu, bangsa Indonesia memiliki sistem gotong-royong atau kebersamaan. Namun, dengan kemajuan teknologi, semangat gotong-royong dirasakan mulai menurun. "Dengan kemajuan teknologi, gotong royong kita rasakan sudah semakin tergerus," jelas Edijan Tanjung.

Sesi penyampaian materi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses penentuan Pancasila sebagai dasar negara dan dengan diskusi. Acara tersebut kemudian ditutup dengan tukar menukar cenderamata dan sesi foto bersama.

Walikota Risma Berbagi Ilmu di PPRA 59 Lemhannas RI

Walikota Surabaya Tri Rismaharini, berkesempatan menjadi penceramah di hadapan peserta PPRA 59 Lemhannas RI, Senin (26/03), di Ruang NKRI Gedung Pancagatra Lantai III. Risma dengan gayanya yang serius tetapi santai memaparkan kinerja pemerintahan kota (pemkot) Surabaya selama di bawah kepemimpinannya, terutama masalah penutupan lokalisasi Gang Dolly yang sempat menjadi isu nasional dan Kota Surabaya yang sukses dengan pelaksanaan *smart city*.

Menurut Risma, penutupan lokalisasi Gang Dolly bukanlah perkara yang mudah. Seperti yang diketahui bersama, banyak sekali penentangan dan bahkan ancaman bom yang ditujukan kepada walikota Surabaya. "Kerusakan anak-anak (di dolly) jauh lebih bahaya daripada apapun. Resiko harus saya ambil, meski saya mati," ungkap Risma kepada peserta PPRA 59.

Untuk menangani anak-anak eks lokalisasi, Risma juga telah membuat sebuah program komprehensif. Anak-anak tersebut disekolahkan gratis di SD negeri manapun. Mereka juga mendapatkan bimbingan konseling yang dibantu psikolog dan psikiater secara rutin. "Agar konseling ini tepat sasaran, dilakukan *screening*, yang kondisi parah, dipisahkan dan diminta ke shelter. Yang lainnya yang

tidak parah dipantau, dibangun lapangan, taman bermain. Ada relawan yang memantau," jelas Risma.

Terkait dengan *smart city* yang dilakukan oleh pemkot Surabaya, Risma membagikan tips bahwa semua *software* yang digunakan bukanlah buatan pihak luar, melainkan buatan ASN sehingga menekan biaya yang lumayan banyak.

"Semua software buatan dari ASN, tidak ada satupun kami beli. Kalau membeli, pertama tidak punya duit. Kalau beli, *source program*-nya biasanya tidak bisa dikembangkan. Harus manggil orang atau bayar lagi kalau beli. Anggaran darimana? Itulah alasannya menjadi murah, semua dikerjakan sendiri," tambahnya.

Risma juga mengungkapkan karena strateginya ini, kini Surabaya mempunyai sistem CCTV (*Closed Circuit Television*) di sejumlah tempat yang dilengkapi dengan *e-tilang*, *face recognition*, hingga *voice* atau peneras suara yang langsung terhubung dengan ruang kendali Surabaya *Intellegent Transport System* (SITS).

"Kerusakan anak-anak (di dolly) jauh lebih bahaya daripada apapun. Resiko harus saya ambil, meski saya mati"

*Walikota Surabaya
Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T*



Gubernur Lemhannas RI Membuka PPSA 22 Lemhannas RI



Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 22 Lemhannas RI Tahun 2019 secara resmi dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Selasa (26/3) di Ruang Dwiwarna Purwa Lemhannas RI.

Pembukaan yang dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional Lemhannas RI, diawali dengan laporan Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Karsiyanto. Dalam laporannya, Karsiyanto melaporkan bahwa PPSA 22 diselenggarakan selama 5,5 bulan dengan dua tahap, tahap pertama selama 1 bulan yaitu orientasi, outbond dan pembelajaran jarak jauh (*off campus*). Sedangkan tahap kedua yaitu, selama 4,5 bulan pembelajaran di Lemhannas RI (*on campus*) yang terdiri dari ceramah, diskusi, Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Penulisan Karya Kertas Ilmiah Perseorangan (Taskap) dan Seminar.

Peserta PPSA 22 Lemhannas RI Tahun 2019 ini berjumlah 80 orang yang berasal dari TNI AD 16 orang, TNI AL 8 orang, TNI AU 6 orang, Polri 15 orang, Kementerian 19 orang, Kopertis 5 orang, Kadin Indonesia 3 orang, Organisasi Masyarakat 5 orang, dan Tokoh Masyarakat 3 orang.

Dalam sambutan Gubernur Lemhannas RI, Agus Widjojo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang terpilih untuk mengikuti PPSA 22 Lemhannas RI Tahun 2019. "Keterpilihan saudara sekalian sebagai peserta PPSA 22 Lemhannas RI merupakan suatu anugerah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut

saudara syukuri" ucap Agus Widjojo.

Namun Agus Widjojo mengingatkan bahwa mengikuti pendidikan di Lemhannas RI bukan semata-mata mengejar formalitas saja. "Diharapkan para peserta dalam program pendidikan ini dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan masing-masing dengan menjalankan perannya sebagai peserta pendidikan yang bertanggung jawab dan bukan semata-mata hanya mengejar formalitas pendidikan di Lemhannas RI," harapnya.

Agus Widjojo juga mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa proses belajar-mengajar di Lemhannas RI bukan untuk bersaing dengan rekan mitra sesama peserta, tetapi setiap individu peserta diberi tantangan untuk berlomba dengan diri sendiri, dan akan terlihat ketika selesai mengikuti proses belajar-mengajar.

"Para peserta menjadi individu yang berbeda dalam pengetahuan, keterampilan analisis serta dalam wawasan kebangsaan yang lebih berkualitas dari masa sebelumnya. Lemhannas RI tidak mengajarkan lomba kepandaian antar peserta, kepandaian hanya memiliki kualitas dan nilai manfaat bukan dicerminkan oleh nilai yang didapat dari sekolah, tetapi ditentukan oleh nilai manfaat dan efektifitas kegunaan ketika bertugas di lapangan," terang Agus Widjojo.

Turut hadir dalam pembukaan tersebut adalah Mantan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, M.H.,M.S. dan Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, Perwakilan dari Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kementerian/Lembaga, dan institusi asal peserta.

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Primer Lemhannas RI

Pengurus anggota Koperasi Primer Lemhannas RI menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Primer Lemhannas RI ke-28 Tahun Buku 2018 yang dihadiri segenap anggota koperasi di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI (27/3).

Rapat tahunan tersebut diawali oleh arahan Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI, Brigjen Pol Drs. Triyono Basuki Pujono, M.Si., yang dilanjutkan laporan ketua Koperasi Primer Lemhannas RI, Priya Jakarsih, S.E., M.Sc.,. Dalam kesempatan tersebut, Priya Jakarsih memaparkan mengenai keanggotaan koperasi serta laba bersih yang dicapai pada tahun 2018 lalu.

Dalam laporannya Priya Jakarsih menyampaikan bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2018 menurun hingga 76,64 % jika dibandingkan SHU Tahun 2017. Penurunan tersebut akibat menurunnya pendapatan dari hasil penerimaan jasa rekanan, akibat revisi karena anggaran belanja barang untuk ATK, snack makan, dan lain-lain yang dikelola oleh koperasi primer lembaga, jasa penyewaan Gedung Dwiwarna Purwa, serta dari hasil jasa penjualan barang sekunder.

Secara umum, kegiatan administrasi telah dapat dilaksanakan sesuai petunjuk dan peraturan yang berlaku di koperasi. Selain itu, kegiatan yang dilakukan adalah pendistribusian barang-barang sekunder yang relatif cukup banyak, dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi asuransi dan perumahan, serta pembagian *door prize* kepada para peserta.



Maktab Pertahanan Angkatan Tentera (MPAT) Malaysia Kunjungi Lemhannas RI

Lemhannas RI menyambut kedatangan para delegasi Maktab Pertahanan Angkatan Tentera (MPAT) Malaysia ketika melakukan kunjungan sebagai bagian dari program pendidikan siswa-siswa MPAT angkatan ke-39 pada Selasa, (2/4) di Lemhannas RI.

Kunjungan tersebut diawali dengan audiensi pimpinan Delegasi MPAT Laksma Mohd Fadzil Kamal bin Mohd. Mohaldin dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang didampingi oleh Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., dan Kepala Biro Kerjasama Settama Lemhannas RI Laksma TNI Budi Setiawan, S.T..

Kunjungan yang menjadi salah satu upaya penguatan kerjasama antar kedua instansi dan kedua negara, dilanjutkan dengan diskusi antara delegasi MPAT dengan perwakilan para peserta PPRA 59 di ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lantai III Lemhannas RI.

Diskusi dibuka oleh Kepala Biro Kerjasama dan dilanjutkan presentasi pengenalan lembaga oleh Kepala Biro Humas dengan moderator Kabag Kerma Luar Negeri Rokerma, Kolonel Lek Rujito D. Asmoro, Gdipl In DS., M.A., RCDS. Dalam kesempatan tersebut Sugeng Santoso menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Lemhannas RI.

"Pada tahun 1960 situasi politik di Indonesia diwarnai oleh eskalasi politik yang timbul akibat adanya ketidakpastian adanya pertarungan antara ideologi liberal dan komunisme serta munculnya wacana untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," kata Sugeng Santoso di hadapan para peserta.

Usai paparan, acara dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber, peserta PPRA 59 dan MPAT angkatan 39. "Dengan diubahnya 'pertahanan' menjadi 'katahanan' mengubah aspek bidang yang lebih luas, tidak hanya menjadi aspek militer, tetapi seluruh unsur yang terkait dengan ketahanan suatu bangsa yang terangkum dalam Astagatra," kata Sugeng Santoso.



Agus Widjojo Berikan Materi Kepemimpinan Kepada PPRA 59 Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan materi kepemimpinan kepada para peserta PPRA 59 hari ini, Rabu (27/3), di Ruang NKRI, Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Widjojo membawakan materi kepemimpinan dengan tema “Pimpinan Indonesia Yang Berkarakter Bangsa” untuk para peserta PPRA 59 yang terdiri dari berbagai unsur dan latar belakang disiplin ilmu.

Agus Widjojo mengharapkan dalam pemaparan materi tersebut, tidak hanya sekedar menyampaikan isi dari materi tersebut, namun dapat berdiskusi dengan para peserta PPRA 59. Agus Widjojo juga mengungkapkan bahwa Lemhannas RI merupakan lembaga pendidikan tertinggi, maka dari itu diharapkan pada peserta PPRA 59 mempunyai pengalaman kepemimpinannya masing-masing untuk dapat disampaikan dalam diskusi kali ini.

Agus Widjojo menyampaikan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah proses dimana seorang pemimpin dapat mengajak seluruh orang yang ia pimpin dalam melaksanakan tugas organisasi. Selain itu, menurutnya, kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai sebuah inti dinamis yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi guna mencapai tujuan.

Dalam memimpin, Agus Widjojo menjelaskan, harus mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga dapat menciptakan kebersamaan di dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan hendaknya juga tidak bersikap bersifat absolut. Dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi yang tidak menentu dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus memahami dan mampu mengidentifikasi situasi saat itu sehingga seorang dapat mengambil keputusan gaya kepemimpinan seperti apa yang harus dilakukan.

Sebelum menutup sesi materi kepemimpinan dan melanjutkan dengan diskusi dengan peserta, Agus Widjojo menyimpulkan bahwa berpikir strategis dapat diartikan bahwa kita harus dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan karena pemimpin harus dapat membaca situasi yang akan terjadi terutama pada faktor eksternal sehingga dapat menjaga komunikasi yang efektif.

Pembekalan Pengenalan Lembaga Bagi CPNS Lemhannas RI

Lemhannas RI menyelenggarakan Pembekalan Pengenalan Lembaga bagi para CPNS Lemhannas RI tahun Penerimaan 2018 di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra, Lemhannas RI, Kamis (28/3). Pembekalan tersebut diberikan oleh Staf Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi, Bagian Penerangan Lemhannas RI, Ni Made Vira Saraswati.

Dalam paparannya, Vira menjelaskan bahwa Lemhannas didirikan pada 20 Mei 1965 yang secara konseptual dilatarbelakangi oleh adanya situasi politik nasional dan internasional yang menyebabkan beberapa kalangan terutama kalangan TNI yang merasa bahwa kehidupan berbangsa saat itu terancam dengan adanya ideologi komunis.

Lemhannas RI, jelas Vira, pada awalnya dibentuk untuk mendidik dan mempersiapkan calon pemimpin nasional dari militer maupun non militer untuk menjaga keutuhan NKRI dan juga diharapkan dapat membina para calon pemimpin agar tujuan nasional dan cita-cita kemerdekaan bangsa dapat dicapai serta tidak terpengaruh dengan ideologi komunis.

Vira kemudian mengatakan bahwa Lemhannas RI memiliki visi menjadi lembaga yang berkualitas, kredibel, dan berkelas internasional dalam bidang ketahanan nasional. Lemhannas memiliki fungsi untuk melaksanakan pendidikan nasional bagi para calon pimpinan tingkat nasional, melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan melakukan pengkajian strategik.

Di akhir paparannya, vira menyebutkan bahwa Lemhannas RI merupakan Lembaga sipil yang terdiri dari tiga unsur yaitu Sipil, TNI dan Polri. Maka dari itu, para CPNS diharapkan mampu menyesuaikan dengan budaya organisasi yang ada. “Diharapkan para CPNS dapat menyesuaikan dengan budaya organisasi yang berbeda antara TNI, Polisi, dan PNS karena pada dasarnya kita semua ingin memajukan Lemhannas RI,” jelas Vira.

Pembekalan yang diikuti oleh 57 orang CPNS tersebut kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai Lemhannas RI secara lebih mendetail.

Lemhannas RI dan Kemitraan Diskusi tentang Reformasi TNI

Lemhannas RI bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau dikenal dengan Kemitraan melakukan diskusi tentang reformasi TNI yang kini masih terus bergulir, Kamis (28/3), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai IV Lemhannas RI. Forum diskusi yang dinamai *intellectual exercise* ini membahas tentang sejarah TNI, proses reformasi, dan problematika terkini agenda reformasi TNI.

Direktur Eksekutif Kemitraan, Monica Tanuhandaru menyampaikan rekan-rekan dari masyarakat sipil ingin bersama-sama memahami masalah dan tantangan reformasi TNI ke depan. "Lembaga kemitraan selama ini membantu pemerintah dalam proses demokratisasi di Indonesia. Masyarakat sipil tidak bisa memutuskan masalah ini secara independen. Apa yang menjadi kekhawatiran rekan-rekan TNI juga menjadi kekhawatiran kami untuk dicari solusi bersama," jelas Monica.

Monica berharap dari diskusi awal ini, dicapai sebuah pemahaman untuk terus memajukan demokrasi Indonesia. Selain dari Kemitraan, hadir pula perwakilan organisasi masyarakat sipil lainnya antara lain Amnesty International dan Imparsial. "Kita ingin ruang

demokrasi dipertahankan dan ruang demokrasi dijaga. Kemitraan juga mengundang teman-teman dari masyarakat sipil yang punya concern sama melihat Indonesia, dan TNI sebagai bagiannya," imbuhnya.

Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didapuk sebagai pembicara utama menjelaskan secara komprehensif tentang sejarah dan dinamika TNI. "TNI lahir dari tentara pejuang kemerdekaan. Dari sejak kelahiran, sudah bersinggungan dengan politik. Perkembangan ini sesuai dengan UUD 1945 dan konteks sistem politik nasional pada waktu itu" ungkap Agus Widjojo.

Agus menambahkan, "Perubahan pemerintahan pada Orde Baru dengan menarik kekuatan militer menjadi kekuatan politik ini menjadi tidak sesuai dengan UUD 1945. Dengan dipilihnya demokrasi sebagai sistem politik tahun 1998, TNI melakukan reformasi peran dan kewenangannya yang berbeda dengan periode sebelumnya."

“*TNI lahir dari tentara pejuang kemerdekaan. Dari sejak kelahiran, sudah bersinggungan dengan politik.*

*Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo*





Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Pengarah: **Mochamad Iriawan** Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi: **Sugeng Santoso**

Redaktur Pelaksana: **Adri Koesdyanto** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Staf Redaksi: **Endah Heliana, Ni Made Vira Saraswati, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia**

Desain: **Dwi Jayanto** Fotografer: **Suryadi, Suyono** Sekretariat: **Suparmo, Gatot, Ayu Novitasari**

Alamat Redaksi: **Biro Humas Settama Lemhannas RI**, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <http://www.lemhannas.go.id>